



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SELASA, 17 DESEMBER 2019

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejaksanaan Agung Turunkan Tim

BENGKULU – Laporan yang dilayangkan oleh PT Karya Dutamandiri Sejahtera selaku kontraktor pengerjaan proyek alun-alun Kota Bengkulu telah sampai ke meja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksanaan Agung Republik Indonesia. Saat ini laporan tersebut tengah didalami dan diselidiki kebenarannya sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Berisikan tentang dugaan pemerasan yang dilakukan oleh konsultan pengawas yakni H.Endri selaku direktur utama PT Civarligma Engineering dan Maas Syabirin Taher selaku Kabid Cipta Karya Dinas Pembangunan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu. Mengatasnamakan Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksanaan Agung, Dr. Mukri SH, MH membenarkan laporan tersebut telah sampai ke Kejagung. Ia mengatakan saat ini laporan tersebut tengah ditelaah oleh jaksa penyidik terkait kebenarannya. Nantinya jika memang ditemukan adanya sesuatu yang berlawanan dengan hukum, Kejagung menurunkan tim ke Bengkulu untuk melakukan pemeriksaan ataupun pemanggilan sejumlah orang baik terlapor maupun pelapor.

“Ya benar, memang ada laporannya masuk ke kita. Sekarang laporan itu masih kita telaah, nanti langkah selanjutnya masih menunggu,”ungkapnya kepada RB saat dihubungi via telephone.

Mukri juga mengatakan bahwa memang benar apa yang dilaporkan tersebut terkait dugaan pemerasan yang dilakukan beberapa orang terhadap pihak kontraktor yang mengerjakan proyek alun-alun di Kota Bengkulu. Namun dirinya masih belum mau mengatakan lebih jelas karena laporan tersebut masih didalami.

“Memang isi laporannya begitu, namun saya belum bisa menjelaskan lebih rinci ya karena masih kita dalami,” tutupnya.

Setelah Polda Bengkulu menyatakan siap melakukan pengusutan, Kuasa Direktur PT Karya Duta Mandiri Sejahtera, Amiruddin Murtuza mengatakan bahwa dirinya selain melaporkan ke Jampidsus juga berniat untuk melaporkan dugaan pemerasan

tersebut ke Polda Bengkulu. Dalam melaporkan hal itu, Anirudin juga akan langsung membawa sejumlah bukti terkait penyerahan uang kepada sejumlah oknum yang dilaporkannya. Menurut informasinya, ia memegang sejumlah bukti penyerahan uang sebesar Rp 990 juta kepada beberapa nama. Hal itulah yang akan dibawanya saat melapor ke Polda Bengkulu.

“Saya siap melapor ke Polda Bengkulu dan menceritakan yang sebenarnya, saya juga akan membawa bukti-bukti,”pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD kota Bengkulu dari Fraksi PKB Jaya marta, S.Sos, M.M turut menyoroti Konflik yang terjadi terkait laporan yang dilayangkan PT. Karya Duta Mandiri Sejahtera ke Kejaksanaan Agung Republik Indonesia perihal tuduhan pemerasan sejumlah uang oleh oknum Konsultan Pengawas bernama Hendri, mantan Kadi PUPR kota Bengkulu dan PPK proyek alun-alun bernama Sabirin serta juga mengkait-kaitkan nama walikota Bengkulu Helmi Hasan.

“Saya prihatin dengan kondisi saat ini. Disatu sisi Walikota Bengkulu seolah-olah dipojokan oleh laporan tersebut karena namanya ikut disebutkan dalam surat yang beredar tersebut dan ini menyangkut nama baiknya. Kemudian disisi lain pihak kontraktor juga dirugikan dengan kondisi yang kabarnya proyek tersebut belum diterminkan dan adanya laporan yang dilakukan pemerasan,” kata politisi PKB tersebut.

Dia menambahkan, bagi nama-nama yang merasa dirugikan terhadap laporan yang dilayangkan ke Kejaksanaan Agung tersebut dan menyebutkan kalau laporan tersebut adalah fitnah, lebih baik laporkan balik jika memang benar laporan tersebut dianggap tidak benar dan fitnah dan jangan hanya diam saja.

“Saya rasa Laporkan balik jika memang laporan tersebut tidak benar

karena ini berkaitan dengan nama baik. Saya sebagai wakil rakyat turut prihatin, karena kalau hanya diam saja nanti orang berfikir kalau apa yang dilaporkan pihak kontraktor tersebut adalah benar. Ini semua agar ada kejelasan terhadap kasus ini segera menemui titik terang. Kita berbicara kejelasan terkait kasus ini agar menjadi jelas sejelas-jelasnya.”ungkapnya.

Untuk kedepannya Sekretaris Komisi III DPRD Kota Bengkulu itu akan mengusulkan kepada pimpinan untuk meminta kejelasan dan klarifikasi terhadap kedua belah pihak. Bagaimana langkah dan tindak lanjut setelah ini.

Seperti diketahui PT Karya Dutamandiri Sejahtera selaku kontraktor pengerjaan proyek alun-alun Kota Bengkulu melaporkan beberapa oknum ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksanaan Agung Republik Indonesia kemarin (12/12). Laporan itu dilayangkan karena kontraktor merasa diperas oleh beberapa oknum konsultan pengawas yakni H.Endri selaku direktur utama PT Civarligma Engineering dan Maas Syabirin Taher selaku Kabid Cipta Karya atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu yang mengatasnamakan Walikota Bengkulu dan yang lainnya.

Kuasa Direktur PT Karya Dutamandiri Sejahtera, Amiruddin Murtuza menjelaskan bahwa pemerasan itu bermula saat kontraktor mengajukan termin 50 persen sejak 40 hari yang lalu. Namun sampai sekarang, pihaknya tidak juga dibuatkan berita acara pembayaran dengan alasan konsultan dan PPK proyek belum mendapatkan sejumlah uang dari sang kontraktor.

“Kontraktor merasa diperas dan dirugikan oleh oknum konsultan dan PPK dengan mengatasnamakan Walikota dan yang lainnya, totalnya sudah Rp 2 miliaran,”ungkapnya(cup/cw2)